

**REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN
HUTAN UNTUK KEPERLUAN KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



OLEH

SHINDI DWI UTARI

2320122005

Pembimbing:

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH

Dr. Hengki Andora, SH., LL.M

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

REDISTRIBUSI TANAH YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPERLUAN KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK

(Shindi Dwi Utari, 2320122005, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 100 halaman, 2025)

Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Salah satu objek redistribusi tanah yaitu tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau perubahan batas kawasan hutan. Kepala kantor pertanahan kabupaten tanah datar memberikan sertifikat hak pakai hasil kegiatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan pemberian hak atas tanah kepada instansi pemerintah, namun tujuan reforma agraria adalah ditujukan untuk kemakmuran rakyat terutama bagi masyarakat kecil yang kekurangan tanah. Hal ini menjadi dasar Penulis melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kantor kepolisian negara RI di Kabupaten Tanah Datar? 2. Bagaimana dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah untuk kantor kepolisian negara RI melalui kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar? 3. Bagaimana pendaftaran hak atas tanah untuk keperluan kantor kepolisian negara RI yang diperoleh melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar?, Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu Yuridis Empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa wawancara dan observasi di lapangan, data sekunder yaitu berupa studi dokumen Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa 1).Pelaksanaan Redistribusi tanah di Kabupaten Tanah Datar dilakukan berdasarkan petunjuk teknis redistribusi tanah tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan memberikan keadilan serta manfaat langsung bagi penerima redistribusi 2).Pertimbangan pemberian hak atas tanah kepada Instansi Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/HP/BPN-03.10/2024 yaitu: a) Tanah telah dikuasai langsung oleh negara, b) Terdapat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, c) telah dilakukan sidang GTRA d) Memenuhi persyaratan. 3).Proses pendaftaran tanah di Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian dari proses kegiatan redistribusi tanah diawali pengajuan berkas, pada tahapan inventarisasi dan identifikasi, setelah itu dilakukan pengukuran dan pemetaan, setelah itu dilakukan proses penetapan SK yang dilakukan setelah sidang GTRA dan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Redistribusi, setelah itu, dilakukan penerbitan sertipikat hak atas tanah yaitu berupa hak pakai untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan bagian dari bisnis proses redistribusi. Setelah diterbitkan sertifikatnya maka dilakukan penyerahan sertipikat secara resmi kepada penerima redistribusi. Penyerahan ini dilakukan secara resmi kepada perwakilan kepolisian (Kapolres).

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Pelepasan Kawasan Hutan, Intansi Kantor Kepolisian Republik Indonesia

**LAND REDISTRIBUTION ORIGINATING FROM THE RELEASE OF FOREST
AREA FOR THE NEEDS OF THE STATE POLICE OFFICE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA IN TANAH DATAR REGENCY**

ABSTRACT

**(Shindi Dwi Utari, 2320122005, Thesis, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas
University, 100 pages, 2025)**

Land redistribution is a series of activities carried out by the government in order to distribute and/or grant land rights originating from TORA (Land Objects of Agrarian Reform) to subjects of agrarian reform accompanied by the granting of land rights certificates. One of the objects of land redistribution is land originating from the release of state forest areas and/or changes in forest area boundaries. The head of the Tanah Datar district land office provides certificates of land use rights resulting from land redistribution activities from the release of forest areas, and the granting of land rights to government agencies less in line with the objectives of agrarian reform. This is the basis for the author to conduct this research. The formulation of the problem in this study is 1. How is the implementation of land redistribution originating from the release of forest areas for the Indonesian National Police Office in Tanah Datar Regency? 2. What is the basis for considering the granting of land rights for the Indonesian National Police Office through land redistribution activities originating from the release of forest areas in Tanah Datar Regency? 3. How is the registration of land rights for the needs of the Indonesian National Police Office obtained through land redistribution originating from the release of forest areas in Tanah Datar Regency? The type of research used by the author is Empirical Jurisprudence, with the research location at the Tanah Datar Regency Land Office. The results of the study show that 1). The implementation of land redistribution in Tanah Datar Regency is carried out based on the technical instructions for land redistribution in 2024 and Presidential Regulation Number 62 of 2023. 2). Considerations for granting land rights to the Indonesian National Police Agency based on Decree Number 2/HP/BPN-03.10/2024, namely: a) The land has been directly controlled by the state, b) There is Physical Control of the Land Area, c) a GTRA hearing has been held d) Meets the requirements. 3). The land registration process in Tanah Datar Regency is part of the land redistribution activity process, starting with the submission of files, at the inventory and identification stage, after that measurements and mapping are carried out, after that the SK determination process is carried out after the GTRA hearing and determination of the object and subject of land redistribution, which is the basis for the issuance of the Redistribution Decree, after that, the issuance of land rights certificates is carried out in the form of usage rights for public facilities and social facilities which are part of the redistribution process business. After the certificate is issued, the certificate is officially handed over to the redistribution recipient. This handover is carried out officially to the police representative (Kapolres).

Keywords: Land Redistribution, Release of Forest Areas, Indonesian National Police Agency